

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai KIPM Banjarmasin

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin didirikan sebagai salah satu bagian integral dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai peranan yang strategis dalam pengembangan dan penyelamatan usaha perikanan di Indonesia, Upaya perlindungan sumberdaya ikan di Indonesia dari ancaman Hama Penyakit Ikan berbahaya dilakukan melalui kegiatan tindakan karantina ikan terhadap media pembawa hama penyakit ikan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 92 /PERMEN - KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Tugas : melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.
- b. Fungsi :
  - penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
  - pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri

dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan surveilan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi

penerapan program manajemen mutu terpadu;

- penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

c. Struktur Organisasi

Sesuai Permen KP No. 92 Tahun 2020 tentang Susunan organisasi Balai KIPM Banjarmasin, terdiri atas:

1. Subbagian Umum yang mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Cakupan wilayah kerja Balai KIPM Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 92 /PERMEN - KP/2020, meliputi : 1. Satker Pelabuhan Trisakti, wilker Batulicin dan Wilket Kotabaru

Untuk mewujudkan tujuan diatas Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin berkomitmen dengan :

### **VISI:**

*“Hasil Perikanan Yang Sehat, Bermutu, Aman Konsumsi dan Terpercaya.”*

### **MISI :**

- 1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.*
- 2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.*
- 3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hama dan penyakit.*

### **TUJUAN :**

*“Melindungi kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta menjamin mutu hasil perikanan nasional”.*

### **SASARAN STRATEGIS :**

- 1. Meningkatnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan ekspor, impor, dan antar area kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam ekspor, impor dan antar area;*
- 2. Meningkatnya jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dapat dicegah penyebarannya antar zona, melalui sertifikasi kesehatan ikan ekspor, impor dan antar area;*
- 3. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra;*

4. *Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor serta;*
5. *Meningkatnya pencegahan penyebaran jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasif melalui kajian dan analisis resiko.*

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai KIPM Banjarmasin. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis Akuntansi*

### **A.3 Basis Akuntansi**

Balai KIPM Banjarmasin menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai KIPM Banjarmasin dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang

asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai KIPM Banjarmasin adalah sebagai berikut:

*Pendapatan- LRA*

**(1) Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan LO*

**(2) Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

*Belanja*

**(3) Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

*Aset*

**5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
  - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan	0,5%

	s.d. tanggal jatuh tempo	
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
  - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga

- (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas  
Pos Laporan  
Realisasi  
Anggaran

Satuan Kerja Balai KIPM Banjarmasin memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 4,675,410,000. Selama tahun 2025, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

### Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNBP	39,870,000	39,870,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>52,960,000</b>	<b>52,960,000</b>
Belanja		
Belanja Pegawai	3,050,491,000	2,716,466,00
Belanja Barang	2,600,658,000	1,958,944,000
Belanja Modal	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5,651,149,000</b>	<b>4,675,410,000</b>

### B.1 Pendapatan

Realisasi  
Pendapatan  
Rp. 41,090,000

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 41,090,000 atau mencapai 103 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 39,870,000. Pendapatan Satuan Kerja Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya dan Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	39,870,000	19,461,000	48.81

Pendapatan Jasa Karantina Perikanan			
Pendapatan Lain-lain	21,629,000	21,629,000	100
<b>Jumlah</b>	<b>39,870,000</b>	<b>41,090,000</b>	<b>103</b>

Realisasi Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya serta Pendapatan atas pelepasan aset TA 2025 mengalami Kenaikan Menjadi 103 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Adanya Pelepasan Aset.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024  
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	19,461,000	29,555,000	48.81
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-	
Pendapatan Lain-lain	21,629,000	-	100
<b>Jumlah</b>	<b>41,090,000</b>	<b>29,555,000</b>	<b>103</b>

Realisasi Belanja  
Rp 4,411,236,745

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja Balai KIPM Banjarmasin pada TA 2025 adalah sebesar Rp 4,411,236,745 atau 94.35% dari anggaran belanja sebesar Rp 4,675,410,000, Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025  
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2,716,466,000	2,642,820,401	97.29
Belanja Barang	1,958,944,000	1,768,416,344	90.27
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>4,675,410,000</b>	<b>4,411,236,745</b>	<b>94.35</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>	<b>4,675,410,000</b>	<b>4,411,236,745</b>	<b>94.35</b>

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 mengalami Penurunan dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat beberapa kegiatan masih dalam pagu saldo blokir AA, sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.

**Perbandingan Realisasi Belanja  
TA 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	2,642,820,401	3,038,969,188
Belanja Barang	1,768,416,344	2,727,291,741
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4,411,236,745</b>	<b>5,766,260,929</b>

**B.3 Belanja Pegawai**

*Belanja Pegawai*  
Rp. 2,642,820,401

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2,642,820,401 dan Rp 3,038,969,188. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2025 mengalami Penurunan sebesar 16,94 persen dari TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2,133,591,755	3,038,969,188	6,5
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	469,653,166	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	31,778,000	0	0,13
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2,642,820,921</b>	<b>3,038,969,188</b>	<b>6.94</b>
<b>Pengembalian Belanja Pegawai</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2,642,820,921</b>	<b>3,038,969,188</b>	<b>6.94</b>

*Belanja Barang*  
1,768,416,344

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 1,768,416,344 dan Rp. 2,727,291,741. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami Penurunan 59.34% dari Realisasi Belanja Barang TA 2025. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Adanya saldo Blokir AA yang mengakibatkan Kegiatan belum dapat terealisasi.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	732,709,669	1,114,634,064	(95.15)
Belanja Barang Non Operasional	61,235,949	13,389,000	(88.78)
Belanja Persediaan	108,811,000	74,635,000	(76.73)
Belanja Jasa	343,931,087	258,137,654	(90.35)
Belanja Pemeliharaan	476,593,206	693,266,513	(96.86)
Belanja Perjalanan Dinas	45,135,433	55,957,846	(58.67)
Belanja Barang Utk diserahkan ke Masyarakat	-	-	-

<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1,768,416,344</b>	<b>2,727,291,741</b>	<b>7.21</b>
<b>Pengembalian Belanja Barang</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,768,416,344</b>	<b>2,727,291,741</b>	<b>7.21</b>

Belanja  
Rp0

Modal

### B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp.0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar 100 % dibandingkan TA 2024 Karena Pada TA 2025 tidak terdapat anggaran untuk belanja modal.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Belanja  
Tanah Rp0

Modal

### B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

#### Perbandingan Realisasi Belanja Tanah TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-

<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	-	-	-

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp0, mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 sebesar Rp.0Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung layanan perkantoran lebih kecil dari sebelumnya.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>%</b>
Komputer Unit			
A.C Split			
Meja dan Kursi			
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 2025</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>%</b>
Renovasi Gedung Kantor	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Belanja Modal Jalan, Irigasi dan*

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA

Jaringan Rp0

2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	-	-	-

Belanja Bantuan Sosial Rp0

### B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
<b>Pengembalian Belanja Modal</b>	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	-	-	-

Aset Lancar

Rp.57,034,105

### PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 57,034,105 dan Rp 25,069,045.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara

Pengeluaran

Rp0

#### C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum

disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024*  
*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
<b>Uang Tunai</b>		0
<b>Bank BNI</b>	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

**C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Tabel 2*  
*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024*  
*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
<b>Uang Tunai</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0*

**C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024*  
*(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
<b>Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran</b>	-	-
<b>Kas Lainnya di Bendahara</b>	-	-

<b>Penerimaan</b>		
<b>Kas Lainnya dari Hibah</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Bukan Pajak  
Rp0

#### C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4  
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
<b>Piutang PNPB</b>		
<b>Piutang Lainnya</b>		
<b>Jumlah</b>	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar  
Tagihan Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp0

#### C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5  
Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.			
	<b>Jumlah</b>	-	-

Bagian Lancar  
Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0

#### C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal

pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Tabel 6*  
*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2025 dan 2024*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.			
	<b>Jumlah</b>	-	-

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek Rp0*

**C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 7*  
*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek*

*(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
<b>Lancar</b>	-	-	-
<b>Kurang Lancar</b>	-	-	-
<b>Diragukan</b>	-	-	-
<b>Macet</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Lancar</b>	-	-	-
<b>Kurang Lancar</b>	-	-	-
<b>Diragukan</b>	-	-	-
<b>Macet</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Lancar</b>	-	-	-
<b>Kurang Lancar</b>	-	-	-
<b>Diragukan</b>	-	-	-
<b>Macet</b>	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	-	-	-

*Beban Dibayar di Muka Rp0*

**C.1.8. Beban Dibayar di Muka**

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus

diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2025 dan 2024  
(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

Pendapatan yang  
Masih Harus Diterima  
Rp0

### C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi lainnya	-	-
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Persediaan  
Rp. 57,034,105

### C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 57,034,105 dan Rp. 25,069,045 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	17,217,605	9,483,295
Bahan untuk Pemeliharaan	4,417,000	804,000
Suku Cadang	0	730,900
Bahan Baku	35,399,500	14,050,850
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>57,034,105</b>	<b>25,069,045</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp 16,568,378,290

### C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 16,568,378,290 dan Rp. 16,682,074,883.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Balai KIPM Banjarmasin berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

Rp. 12,431,711,000

#### C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 12,431,711,000 dan Rp. 12,431,711,000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel 11

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025	12,431,711,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 30 Desember 2025	12,431,711,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	12,431,711,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 12

Rincian Tanah TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	1.869 m2	iA. yani, Km. 29,42n Yoes	11.749.282.000
2	510 m2	Jl. Angkasa No.16	682.429.000
Jumlah			14.422.138.000

Peralatan dan Mesin

### C.2.2. Peralatan dan Mesin

Rp. 4,255,383,615

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,255,383,615 dan Rp. 4,255,383,615.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Tabel 13*  
*Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025</b>	<b>4,255,383,615</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pembelian</b>	
<b>Hibah</b>	
<b>Transfer Masuk</b>	
<b>Koreksi Tambah</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Penghentian aset dari penggunaan</b>	
<b>Saldo Per 30 Juni 2025</b>	<b>4,255,383,615</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025</b>	
<b>Nilai Buku Per 30 Juni 2025</b>	<b>4,255,383,615</b>

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

Pembelian komputer unit berupa PC senilai Rp-; dan

Pembelian peralatan komputer senilai Rp0.

Pembelian Alat Rumah Tangga senilai Rp0.

Pembelian Alat Pengolahan senilai Rp 0.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin dan Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan*

*Bangunan*

*Rp. 4,634,886,200*

### **C.2.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,634,886,200 dan Rp. 4,634,886,200.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 14*  
*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2025*  
*(dalam rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025</b>	<b>4,634,886,200</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pembangunan Gedung</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	-
<b>Saldo Per 30 Juni 2025</b>	<b>4,634,886,200</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2025</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>	<b>4,634,886,200</b>

Tidak Terdapat Transaksi penambahan Gedung dan Bangunan pada Balai KIPM Banjarmasin  
Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Rp. 276,361,500

#### C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 276,361,500 dan Rp. 276,361,500 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15  
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan  
(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025</b>	276,361,500
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Koreksi Pencatatan</b>	
<b>Saldo Per 30 Juni 2025</b>	276,361,500
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>	<b>276,361,500</b>

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya  
Rp.0

#### C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. dan Rp 8,618,479 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel 16  
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya  
(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
-	-
<b>Mutasi Kurang:</b>	
-	-
<b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>
<b>Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>	<b>0</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi Dalam  
Pengerjaan Rp0

### C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp. 5,029,964,025

### C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 5,029,964,025 dan Rp. 4,916,267,432

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 17  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
(dalam rupiah)

<b>No</b>	<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akum. Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku</b>
<b>1</b>	Tanah	12,431,711,000		12,431,711,000
1.	Peralatan dan Mesin	4,255,383,615	(4,100,050,816)	155,332,799
2.	Gedung dan Bangunan	4,634,886,200	(823,039,095)	3,811,847,105
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	276,361,500	(106,874,114)	169,487,386
4.	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>21,598,342,315</b>	<b>(5,029,964,025)</b>	<b>16,568,378,290</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka  
Panjang  
Rp0

### C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Balai KIPM Banjarmasin merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

Piutang Tagihan  
Tuntutan  
Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi  
(TP/TGR)  
Rp0

**C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/  
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel 18*  
*Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2025 dan 2024*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
6.	-		
	<b>Jumlah</b>		

Tagihan Penjualan  
Angsuran Rp0

**C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

Rincian TPA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Tabel 19*  
*Rincian Piutang TPA TA 2025 dan 2024*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1.	-		
2.	-		
3.	-		
4.	-		
5.	-		
	<b>Jumlah</b>		

Penyisihan Piutang  
Tidak Tertagih –  
Piutang Jangka  
Panjang Rp0

**C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Tabel 20*  
*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang TA 2025*

*(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
<b>Lancar</b>	-		
<b>Kurang Lancar</b>	-		
<b>Diragukan</b>	-		
<b>Macet</b>	-		
<b>Jumlah</b>	-		
<b>Tagihan TPA</b>			
<b>Lancar</b>	-		
<b>Kurang Lancar</b>	-		
<b>Diragukan</b>	-		
<b>Macet</b>	-		
<b>Jumlah</b>	-		
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>	-		

*Aset Lainnya*

*Rp0*

#### **C.4. Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Balai KIPM Banjarmasin terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak Berwujud*

*Rp0*

##### **C.4.1. Aset Tak Berwujud**

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai KIPM Banjarmasin berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Adapun mutasi transaksi Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

*Tabel 21*  
*Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud*

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Pembelian</b>	
<b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>	-
<b>Amortisasi s.d. 31 Desember 2025</b>	
<b>Nilai Buku Per 30 Desember 2025</b>	-

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 22  
Rincian Aset Tak Berwujud TA 2025

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	-	-
2.	-	-
	<b>Jumlah</b>	-

Aset Lain-Lain  
Rp0

#### C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai KIPM Banjarmasin. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel 23  
Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2025</b>	-
<b>Mutasi tambah:</b>	
<b>Reklasifikasi dari Aset Tetap</b>	
<b>Mutasi Kurang:</b>	
<b>Penggunaan kembali BMN yang dihentikan</b>	
<b>Penghapusan BMN</b>	
<b>Saldo Per 31 Desember 2025</b>	-
<b>Amortisasi s.d. 31 Desember 2025</b>	
<b>Nilai Buku Per 31 Desember 2025</b>	-

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya Rp0

#### C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 24  
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2025

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
<b>A.</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>			
1.	Software			
	<b>Jumlah</b>			
<b>B.</b>	<b>Aset Lain-lain</b>			
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Total</b>	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka  
Pendek Rp. 12,930,809

### C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 12,930,809 dan Rp. 38,287,051. Utang Pihak Ketiga Terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Rp. 555.000 (Langganan PDAM Bulan Desember 2025), Rp. 9.373.925 (Langganan Listrik Bulan Desember 2025), Rp. 63.714 (Langganan Telepon Bulan Desember 2025) dan Rp. 2.938.170 (Langganan Internet Bulan Desember 2025).

Uang Muka dari KPPN  
Rp. 0

#### C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak  
Ketiga Rp. 12,930,809

#### C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 12,930,809 dan Rp. 38,287,051. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Balai KIPM Banjarmasin per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Tabel 25*  
*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2025*  
*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Jumlah
1	Langganan PDAM	555.000

<b>2</b>	Langganan Listrik	9.373.925
<b>3</b>	Langganan Telepon	63.714
<b>4</b>	Langganan Internet	2.938.170
<b>Total</b>		<b>12,930,809</b>

Utang Pihak Ketiga Terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Rp. 555.000 (Langganan PDAM Bulan Desember 2025), Rp. 9.373.925 (Langganan Listrik Bulan Desember 2025), Rp. 63.714 (Langganan Telepon Bulan Desember 2025) dan Rp. 2.938.170 (Langganan Internet Bulan Desember 2025).

Utang Yang Belum Diterima Tagihannya Rp 0

### C.5.3. Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Utang Yang belum diterima Tagihannya pada satker balai KIPM Banjarmasin Sebesar Rp. 0

Tabel 26

Rincian Utang Yang belum diterima Tagihannya TA 2025 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Kuitansi yang Belum di SPM kan	0
2.	Gaji PJPB Bulan Juni 2025	0
<b>Total</b>		<b>0</b>

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

### C.5.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2025 (dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
-	
-	
-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

### C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28  
Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2025 dan  
2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024
<b>Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar</b>	-	-
<b>Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar</b>	-	-
<b>Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Ekuitas

Rp. 16,612,481,586

### C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.16,612,481,586 dan Rp. 16,677,475,356. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan  
PNBP  
Rp. 41,090,000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 29,555,000 dan Rp. 41,090,000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	19,461,000	29,555,000	
Pendapatan Pendidikan	-	-	
Pendapatan Pelepasan Aset	21,629,000	-	
<b>Jumlah</b>	<b>41,090,000</b>	<b>29,555,000</b>	

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya, Pendapatan Jasa Karantina Perikanan dan pendapatan atas Pelepasan Aset.

Beban Pegawai  
Rp. 2,630,184,973

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah

masing-masing sebesar Rp.2,630,184,973 dan Rp. 3,051,604,616. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji	1.290.023.067	1.558.848.202	1,2
Beban Tunjangan-tunjangan	1.340.161.906	1.488.495.414	0,9
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	3.9576.000	4.261.000	9.2
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1,834,657,939</b>	<b>3,051,604,616</b>	<b>6.02</b>

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp. 94,560,661

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar R. 94,560,661 dan Rp. 162,786,400. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	47,768,335	65,065,032	7.34
Beban Persediaan bahan baku	46,792,326	97,721,368	4.78
<b>Jumlah Beban</b>	<b>94,560,661</b>	<b>162,786,400</b>	<b>5.80</b>

Beban Barang dan Jasa Rp.

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing

1,133,774,370

sebesar Rp. 1,133,774,370 dan Rp. 1,471,206,312. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	513,787,659	849,661,254	0,84
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	50,688,000	85,531,900	0,08
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	379,000	13,008,000	8,14
Beban Honor Operasional Satker	97,056,000	80,256,000	0,68
Beban Barang Operasional Lainnya	69,718,980	83,932,480	0,48
Beban Bahan	55,655,949	56,870,000	0,07
Beban Honor Output Kegiatan	4,080,000	4,896,000	0,60
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000	28,236,116	0,88
Beban Langganan Listrik	74,105,810	154,786,540	0,73
Beban Langganan Telepon	4,719,054	5,040,304	1,00
Beban Langganan Air	17,007,214	18,451,887	1,32
Beban Sewa	12,000,000	25,000,000	100
Beban Jasa Lainnya	233,076,704	65,535,831	0,63
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1,133,774,370</b>	<b>1,471,206,312</b>	<b>7,71</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp. 493,758,106*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 493,758,106 dan Rp. 731,717,313. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	186,322,870	279,348,300	6.06
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	290,270,336	413,918,213	7.01
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	16,434,000	34,764,900	4.72
Beban Persediaan suku cadang	-	3,685,900	100
<b>Jumlah Beban</b>	<b>493,758,106</b>	<b>731,717,313</b>	<b>6.74</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp. 45,135,433

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 45,135,433 dan Rp. 440,005,794. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanannya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	8,240,000		100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	423,355,794	70.59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,895,433	16,650,000	1,85
<b>Jumlah Beban</b>	<b>45,135,433</b>	<b>440,005,794</b>	<b>10.12</b>

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp0

**D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada

Masyarakat  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	-	-	
<b>Jumlah Beban</b>	-	-	

*Beban Bantuan Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang	-	-	
<b>Jumlah Beban</b>	-	-	

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 111,716,593*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 111,716,593 dan Rp. 393,579,060. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Beban  
Penyisihan  
Piutang Tidak  
Tertagih Rp0

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	-	-	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	-	-	
<b>Jumlah Beban</b>	-	-	

Kegiatan Non  
Operasional  
Rp0

#### D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional  
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Penjualan Alat Kantor	-	-	
Selisih Kurs	-	-	
Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	
<b>Jumlah Beban</b>	-	-	

Pada laporan operasional dan laporan realisasi anggaran terdapat perbedaan yang dijelaskan sebagai berikut:

<b>Penjelasan Selisih Belanja Pegawai antara LRA dan LO</b>	
Belanja Pegawai (LRA)	Rp. 2.630.184.973
Belanja Pegawai (LO)	<u>Rp. 2.642.820.401</u>
Selisih	Rp. 12.635.428

Penjelasan: Merupakan Jumlah Tunjangan Kinerja PNS Bulan Desember 2024 yang dibayarkan di bulan Januari 2025. Pada saat 31 Desember 2024 dicatat sebagai Belanja Pegawai yang belum dibayarkan

**Penjelasan Selisih Belanja Barang antara LRA dan LO**

PNBP	(LRA)	Rp. 19,461,000
PNBP	(LO)	<u>Rp. 41,090,000</u>
Selisih		Rp. 21,629,000
Penjelasan: Merupakan Adanya Pelepasan Penjualan Aset (Lelang) Rp. Rp.21,629,000 dari proses penghapusan BMN yang rusak.		
Beban Pemeliharaan	(LRA)	Rp. 476.593.206
Beban Pemeliharaan	(LO)	<u>Rp. 493 758.106</u>
Selisih		Rp. 17.164.900
Penjelasan : Merupakan Jumlah dari Beban Persediaan Suku Cadang Rp. 730,900 dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan Rp. 16,434,000.		

*Pos Luar Biasa Nihil*

**D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal Rp. 16,677,475,356*

**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 16,677,475,356 dan Rp. 20,767,599,191.

*Defisit LO Rp (4,470,565,141)*

**E.2. Surplus/Defisit-LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp (4,470,565,141) dan (6,238,392,763) Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0*

**E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi**

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai*

**E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Aset Rp0

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0

#### **E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 28*  
*Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2025*

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	-
2.	Suku Cadang	-
<b>Jumlah</b>		-

Selisih Revaluasi  
Aset Rp0

#### **E.4.3. Selisih Revaluasi Aset**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset  
Non Revaluasi  
Rp0

#### **E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

*Tabel 29*  
*Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2025*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
<b>Peralatan dan Mesin</b>	-
<b>Gedung dan Bangunan</b>	-
<b>Jumlah</b>	-

Koreksi Lain-lain  
Rp0

#### **E.4.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Tabel 30*  
*Rincian Koreksi Lain-lain TA 2025*

Jenis Koreksi	Jumlah
<b>Koreksi Beban</b>	-
<b>Koreksi Pendapatan</b>	-
<b>Koreksi Piutang</b>	-
<b>Koreksi Kewajiban</b>	-
<b>Koreksi Hibah</b>	-
<b>Jumlah</b>	-

*Transaksi Antar Entitas Rp. 4,407,551,371*

### **E.5. Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,407,551,371 dan Rp. 2,148,268,928.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

*Tabel 31*  
*Transaksi Antar Entitas TA 2025*

Jenis Persediaan	Koreksi
<b>Diterima dari Entitas Lain</b>	(41,090,000)
<b>Ditagihkan ke Entitas Lain</b>	4,411,236,745
<b>Transfer Masuk</b>	37,537,726
<b>Transfer Keluar</b>	(133,100)
<b>Pengesahan Hibah Langsung</b>	-
<b>Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung</b>	
<b>Jumlah</b>	<b>4,407,551,371</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

#### **E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp(41,090,000) sedangkan DKEL sebesar Rp. 4,411,236,745.

#### **E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

sebesar Rp. 37,537,726 merupakan Transfer masuk sertifikat dari balikpapan, sertifikat dari Sekretariat dan bahan laboratorium dari BUSKIPM terdiri dari:

Tabel 32  
Transfer Masuk TA 2025

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Bahan Laboratorium	BUSKIPM	30.000.000
2.	Health Certificate	Sekretariat Badan	7,537,726
<b>Jumlah</b>			<b>37,537,726</b>

Terdapat Transfer Keluar sebesar Rp. 133,100 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 merupakan sertifikat ke balikpapan .

Tabel 33  
Transfer Keular TA 2025

No.	Jenis	Mutasi Keluar	Nilai
1.	Health Certificate	Balai KIPM Balikpapan	133,100
<b>Jumlah</b>			<b>133,100</b>

### E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 34  
Pengesahan Hibah Langsung TA 2025

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.	-	-	-
2.	-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>			
<b>Pengesahan Pengembalian Hibah</b>			-
<b>Jumlah</b>			-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

### E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

masing-masing adalah sebesar Rp. 16,612,481,586 dan Rp. 16,677,475,356

## **PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat Kejadian-kejadian Penting setelah tanggal Neraca.

#### F.1 Pengungkapan Lain-lain

Program Prioritas Nasional Tahun 2025 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan lingkup BPPMHKP dengan pagu yang telah direvisi senilai Rp. 330.360.000 dan realisasi senilai Rp. 185,259,898

atau 17,83% dari pagu, dengan rincian disajikan pada Tabel Realisasi Anggaran Belanja Kegiatan Prioritas Nasional (PN) Satker Balai KIPM Banjarmasin per 31 Desember 2025. Terdapat 145.100.102 beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan (terrealisasi) dikarenakan msh dalam tahap saldo blokir

- 3989.PDC - Sertifikasi Produk
- 3989.PDF - Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi
- 3989.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk
- 7010.QIA - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi
- 7010.PBR - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan pengujian sektor kelautan perikanan

Tabel 35

#### Program Prioritas Nasional TA 2025

Rincian Output	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
3989.PDC - Sertifikasi Produk	49,140,000	13,800,000	35.60
3989.PDF Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi	85,220,000	17,570,000.	48.50
3989.QIA - Pengawasan dan Pengendalian Produk	25.000.000	9,694,949.	25.78

3989.QIC - Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	15.000.000	3.500.000	42.85
7010.PBR - Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan	90.000.000	90.000.000	100
7010.PDD.001 - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance ses	25.000.000	25.000.000	100
7010.PDD.001 - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance ses	16.000.000	16.000.000	100
7010.QIA - Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	25.000.000	9.694.949	25.78
Total	330.360.000	185,259,898	17.83%

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai KIPM Banjarmasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : KEP.001/06.0/KU.110/I/2022 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Pejabat Pengelola Keuangan Balai KIPM Banjarmasin sebagai berikut:

Pejabat Pembuat Komitmen	:	Rachmiyati,S.E
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM:		Untung Ifriansyah, S.Sos
Bendahara Pengeluaran	:	Yusniati Aritonang, A.Md.,S.E